

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*. UU Nomor 25 Tahun 2009.
- _____. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006.
- _____. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Kepmenpan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003.
- _____. *Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Pembentukan Perangkat Daerah*. Perda Nomor 9 Tahun 2016.
- _____. *Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi*. Perwali Nomor 20 Tahun 2018.
- _____. *Peraturan Walikota Sukabumi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi*. Perwali Nomor 50 Tahun 2020.

B. Buku

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan. Bahan Hukum Penataran Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1992.
- Juliantara, Dadang. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Mulyadi. *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Prins, W.F. dan Kosim Adisapoetra. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1987.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Ratminto dan Atik Septi. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter, dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Surjadi. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

C. Lain-lain

Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. "Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah". *Makalah*.

Nurwindiarti, Maylin.a "Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016.

Pemerintah Kota Sukabumi. "Dinas Penanaman Modal PTSP". <https://portal.sukabumikota.go.id/dinas-penanaman-modal-ptsp>. Diakses tanggal 5 Maret 2023.

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota-lt5514ad1af157a>. Diakses tanggal 16 Februari 2023.

Setiawan, Iwan. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi. *Wawancara* tanggal 26 April 2023.

Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab". *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV.

Yasyari, Andi Muhammad Faizal. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Pemberian Izin Perhotelan di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012.